



**Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan**  
issn 2354-6174 eissn 2476-9649  
Tersedia online di: [journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah](http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah)  
Volume 10 Nomor 1 2022, (101-120)  
DOI: 10.21043/fikrah.v8i1.10639

## **Wacana Radikalisme di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar; Kontestasi dan Pertarungan Gagasan di Ruang Publik Kampus**

**Awal Muqsith**

*Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia*  
[awal.muqsith@uin-alauddin.ac.id](mailto:awal.muqsith@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstract**

This article discusses of circulation processes and dissemination of radicalism ideas at the Alauddin State Islamic University (UIN) Makassar. This article uses a qualitative research method that seeks to interpret and describe patterns of radicalism infiltration strategies. In order to achieve that goals, the study used survey that has been followed by three hundred and fifty respondents from all faculty of Alauddin State Islamic University (UIN) which took place from January to May 2019. The survey used questioner with multiple choice questions pattern. The results showed that there was a split view and contesting concept among students between accepting Pancasila and the idea of the Islamic state. The very sensitive political issues of political Islam circulated inadequately in UIN Alauddin Makassar. Therefore, the radical ideas will easily infiltrate the minds of students using lip service and manipulation of sensitive Islamic political teachings. The Campus mosque is the most vulnerable area to be used as a platform for spreading radical ideas. The radical forum is usually camouflaged in an ordinary-teaching form, which makes it difficult for students to identify. The case that occurred in UIN Alauddin Makassar could be occurred in other Islamic universities and colleges in Indonesia.

**Keywords:** Islamism, Radicalism, UIN Alauddin Makassar

## Abstrak

Artikel ini membahas proses sirkulasi dan diseminasi ide radikalisme di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha menafsirkan dan menggambarkan pola strategi infiltrasi radikalisme. Untuk mendapatkan tafsiran dan gambaran tentang sirkulasi ide radikalisme, maka penelitian menggunakan survei yang telah diikuti sebanyak tiga ratus lima puluh responden yang berlangsung pada bulan Januari sampai dengan April tahun 2019. Sumber data adalah responden mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebar di setiap fakultas. Survei berbentuk kuesioner dengan bentuk pertanyaan pilihan ganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sikap dilematis di kalangan mahasiswa antara penerimaan Pancasila dan penegakan negara Islam. Isu-isu politik Islam yang sensitif masih sangat minim tersirkulasi dengan baik di UIN Alauddin Makassar. Wacana radikalisme rentan menginfiltrasi benak mahasiswa melalui propaganda dan manipulasi ide politik yang sensitif tersebut. Masjid Kampus menjadi salah satu daerah strategis yang paling sering dijadikan sebagai wadah untuk menebarkan isu-isu sensitif radikalisme. Kajian tersebut dibungkus dengan kajian keislaman serta berkamuflase sedemikian rupa dengan nama forum yang sulit diidentifikasi oleh mahasiswa. Kasus yang menimpa UIN Alauddin Makassar bisa jadi merupakan miniatur bagi universitas dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Islamisme, UIN Alauddin Makassar, radikalisme

## Pendahuluan

Tahun 2010, Zuly Qodir menemukan bahwa di masjid kampus “sekuler” di Yogyakarta ditengarai terjangkiti ideologi radikal. Penemuan Qodir di masjid kampus (maskam) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menegaskan bahwa terjadi penyebaran ide dan gagasan Islam Transnasional yang berafiliasi terhadap organisasi Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Pola pemahaman keislaman yang mencolok dari hasil wawancara Qodir dengan para takmir masjid, memperlihatkan indikasi benih radikalisme yang disemai dari kajian para mahasiswa di maskam tersebut. Selain itu, mahasiswa yang aktif di maskam berasal dari latar belakang fakultas sains dan eksakta, yaitu: Teknik, Kedokteran, Farmasi dan Biologi yang memiliki pola pikir tekstual dan positivistik (Qodir, 2014).

Indikasi terjangkitnya dunia kampus terhadap isu radikalisme semakin diperkuat oleh temuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Riset BNPT tahun 2017 menunjukkan bahwa beberapa universitas ternama di Indonesia terpapar radikalisme (Wiji et al., 2019). Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemendikristek Dikti), bahkan mengakui adanya wabah radikalisme di kehidupan kampus. Gagasan yang ditengarai sebagai ekspansi dan perpanjangan dari ide radikalisme juga menjadi konsumsi publik yang sering diakses dan dibuka oleh para pengguna internet

di Indonesia termasuk mahasiswa. Salah satu indikatornya melalui tema dan gagasan yang ditengarai tersusupi virus radikalisme, yang paling sering dikunjungi dan dicari oleh para peselancar internet. Kata kunci khilafah (Munabari et al., 2020) misalnya, menjadi kata yang paling sering dicari oleh masyarakat Indonesia pada lintasan dan laman tautan internet, bahkan periode 31 Maret 2019 sampai dengan 06 April 2019 popularitas khilafah berada pada skor 100 dari skala 0-100. Menjelang bulan Agustus 2019 skor tersebut turun sampai 60/100. Kata pencarian “Negara Islam” juga sangat sering digunakan oleh peselancar internet Indonesia. Sejak Januari 2017 sampai dengan pertengahan Mei 2019 presentasi popularitas pencarian entry “Negara Islam”, tidak pernah turun dari skala 40/100, bahkan pada Maret 2019 sampai dengan Mei 2019 popularitas entry “Negara Islam” menembus rata-rata 65/100. Pencarian konten “Negara Islam” paling sering dikaitkan dengan entry Jamaluddin al-Afghani, Sayyid Quṭb dan Taqiyuddin al-Nabhani dengan tingkat popularitas ± 500%.

Data tersebut meskipun tidak seluruhnya merepresentasikan konsumsi informasi mahasiswa dan sirkulasi ide di dunia kampus, namun setidaknya menunjukkan bahwa produksi dan sirkulasi ide radikal telah menjadi konsumsi publik dan dunia kampus tidak terkecuali (Wicaksana et al., 2021). Kampus merupakan produsen ide dan gagasan yang mampu menjadi penggerak bagi perubahan sosial. Gagasan Gramsci tentang ideologi organik (organic ideology) yang mampu memberikan perubahan sosial dan pengembangan masyarakat sipil (civil society) bersemai dan dibentuk pada institusi semacam kampus, sekolah, masjid dan lainnya. Ideologi organik diproduksi oleh, yang disebut Gramsci, organik intelektual. Intelektual organik adalah para agen intelektual berfungsi sebagai agen sosial dan bertanggung jawab untuk memberikan formulasi dan distribusi ideologi organik dalam pelebagaan kutub kekuasaan. Pola distribusi pengetahuan semacam ini yang selanjutnya dikenal sebagai hegemoni (Williams, 2020).

Kekuatan kampus terletak pada kapital yang dimiliki oleh para civitas akademik, intelektual organik, agen perubahan yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial (social balance) di masyarakat. Posisi strategis inilah yang menjadikan kampus sebagai target utama untuk memperebutkan dominasi dan hegemoni wacana (Fautanu, 2022). Strategi sirkulasi ide radikalisme memiliki bentuk baru yang mampu mengelabui tradisi rasionalitas yang selama ini erat dengan citra kampus. Penelitian ini ingin menginvestigasi strategi narasi yang digunakan oleh kelompok radikal dalam menyebar dan

menyamai gagasan di kampus. Gagasan radikal diolah dengan semangat emansipatoris, sarat dengan retorika kritis serta argumen yang mendapatkan legitimasi keagamaan (Miftahudin et al., 2021). Proses produksi ideologi ini tidak lagi menggunakan strategi lama, dengan menyembunyikan kebenaran dengan bungkus dogma dan doktrin, akan tetapi proses produksi ide ini menggunakan logika kontestasi gagasan. Dalam studi ideologi yang dikaji Slavoj Žižek, terdapat satu bentuk ideologi yang dikenal sebagai Ideologi in-and-for itself.

Jenis ideologi ini mampu bekerja di lingkungan rasional dan budaya nalar yang disebut Žižek sebagai masyarakat tekno kapitalis. Pola kerja ideologi yang bekerja dalam-dan-untuk dirinya sendiri tidak lagi menyembunyikan kebenaran di balik kepalsuan dan manipulasi dogmatis dan indoktrinasi, akan tetapi bekerja melalui melimpahnya informasi serta menggumpalnya data dan analisis para ahli. Keberlimpahan informasi tidak menjadikan kesadaran kritis semakin tajam, malah menjadi komodifikasi bagi pertarungan kuasa dan kontestasi politik (Žižek, 1994). Kemunafikan, kebodohan dan ketidaksadaran bukan lagi menjadi alat ideologi yang ampuh, untuk membodohi masyarakat. Melainkan ideologi bekerja di balik berlimpahnya sikap asketisme, kejujuran, informasi dan pengetahuan. Pola kerja inilah yang dicurigai sedang beroperasi pada ideologi radikalisme, yang membuatnya mampu melewati sensor ketat akademik dari dunia kampus.

Sirkulasi ide radikal dengan model di atas, juga tersebar di kampus-kampus Islam, termasuk Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. UIN Alauddin Makassar, menjadi salah satu sasaran dari penyemaian ide radikal, karena menjadi salah satu universitas penting di Indonesia Timur, dan menjadi destinasi ilmiah bagi para mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah pelosok ujung Timur Indonesia (Rahmatiah et al., 2022). Posisi UIN Alauddin Makassar yang cukup strategis sebagai produsen intelektual organik, tentu menjadi sasaran bagi para agen radikal untuk menyemaikan gagasan dan pergerakan di dunia kampus. Pola kerja yang mampu melewati sensor akademik, merupakan langkah taktis yang perlu diurai, terutama penyebarannya di kampus-kampus Islam, khususnya di UIN Alauddin Makassar. Lalu, bagaimanakah pola distribusi ideologi radikalisme di kampus dan mampu diterima oleh kalangan akademik? Bagaimana strategi sirkulasi gagasan radikalisme dengan segala bentuk kamufase rasionalitasnya dapat lolos dari sensor intelektual dunia kampus? Permasalahan itulah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## Kajian Teori

Makna radikalisme yang terserap dalam diskursus keindonesiaan lebih menekankan pada sisi negatif dari kata radikal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia radikalisme berarti; 1) paham atau aliran radikal dalam politik; 2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; dan 3) sikap ekstrem dalam aliran politik (Depdiknas, 2008). Menurut Maria Schottenius, terjadi erosi makna radikal dalam kurun waktu seratus tahun. Di masa lalu, konsep radikal erat dengan lukisan gerakan budaya radikal Denmark yang mengkritik hegemoni ideologis yang dipropagandakan oleh gereja, kerajaan dan pihak militer. Akan tetapi saat ini pergeseran makna radikal lebih ditujukan kepada sekelompok kaum anarkis yang turun ke jalan memprotes karikatur Muhammad (Goerzig & Al-Hashimi, 2014).

Gagasan radikalisme dan Islam bukanlah sesuatu yang akrab pada awalnya. Artinya terdapat jarak yang sangat jelas antara radikalisme dan idealisme Islam (Tibi, 2014). Demikian pula, pada awalnya istilah radikal merupakan sebuah term positif yang memiliki *prestige* tersendiri dalam dunia filsafat (McLaughlin, 2012). Istilah radikal, bahkan menjadi salah satu ciri instrumen filosofis untuk mengurai sebuah fenomena dan realitas tertentu. Makna etimologis, “*radix*” yang memiliki nuansa makna mendalam sampai ke akarnya, masih akrab dijumpai dalam literatur filsafat. Namun ketika istilah radikal digunakan dalam dunia politik dan kajian sosial-kemasyarakatan, nuansa positif dalam term “*radix*” berubah menjadi istilah pejorative (Mandaville et al., 2009). Hal tersebut disebabkan oleh tapal batas dari aplikasi “*radix*”, dalam tataran ide (*cognitive radicalization*) dan aksi (*behavioural radicalization*) (Steiner & Önnersfors, 2018).

Penelanjangan sebuah gagasan dan ide sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai mengganggu stabilitas dan *status quo* epistemik dalam tataran kognitif mampu melahirkan gagasan baru. Namun ketika nuansa makna “*radix*” diterapkan pada tataran aksi dan tindakan, terutama pada aksi dan gerakan politik, akan mendatangkan konflik (Khalil, 2017). Sebab, tindakan yang ditujukan untuk menggugat *status quo* akan menyebabkan konflik antara penguasa dan agen radikal. Demarkasi inilah yang perlu diperhatikan dalam mengkaji gagasan radikalisme agar tak terjebak dalam tudingan subjektivisme dan bias ideologis.

Kompleksnya realitas dan data historis tentang radikalisme di Indonesia, membuat Greg Fealy untuk mewanti-wanti penerapan dan penggunaan istilah radikalisme yang memerlukan kecermatan dan kehati-hatian yang serius. Definisi kelompok Islam radikal yang ditawarkan oleh Fealy setidaknya harus memiliki beberapa karakteristik yang saling berhubungan satu sama lain: Pertama kepercayaan mereka bahwa Islam harus diimplementasikan secara total dan literal sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Quran dan Sunnah, terutama ajaran Islam yang bersentuhan langsung dengan hubungan sosial kemasyarakatan, dan permasalahan hukum tertentu: Kedua sikap yang reaktif, baik melalui bahasa, gagasan, bahkan dengan kekerasan fisik atas segala ideologi yang menjadi turunan dari materialisme, sekularisme yang dianggap sebagai penyimpangan. Mereka membangun sikap antipati terhadap *status quo* agar mampu menawarkan ajaran dasar Islam sebagai dasar pembangunan ulang masyarakat dan negara (Fealy, 2004).

Bassam Tibi, lebih menyukai istilah islamisme ketimbang radikalisme dalam menyikapi fenomena kekerasan politik yang dilakukan oleh kelompok Islam. Menurut Tibi, esensi dari term Islamisme mengarah kepada agenda politik dalam memproduksi ulang sistem dunia dengan menggunakan agama sebagai instrumen politik (*religionized politics*). Karakteristik dari islamisme menurut Tibi adalah; 1) membentuk negara berdasarkan sistem Islam (*nizām Islāmī*); 2) sikap permusuhan dan kecurigaan berlebihan atas konspirasi Yahudi dalam membentuk “Tatanan Dunia ala Yahudi”; 3) dualisme yang mengarah kepada kemunafikan dalam menyikapi ide demokrasi; 4) ideologisasi jihad yang mengarah kepada terorisme jihad; 5) reinvensi syari’ah sebagai sistem hukum, dan; 6) propaganda puritanisme sebagai instrumen perlawanan bagi proyek sekularisasi (Tibi, 2012). Narasi dan pemaknaan radikalisme memiliki banyak bentuk dan bewajah ganda. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar yang mampu menangkap multiplisitas makna yang ada dalam gagasan dan ideologi radikalisme, yaitu: Pembentukan negara Islam. Bagi kelompok radikal, sistem *nation state* telah menghancurkan satu sendi terpenting dalam Islam, yaitu konsep *ummah* (Munabari et al., 2020) Konsep *ummah* dianggap sebagai antitesa bagi gagasan nasionalisme sempit yang terbatas oleh zona dan teritori (Cesary, 2018). Berbeda dengan *ummah* yang dianggap bersifat global dan supranational yang mengikat ego dan *sense of belonging* dari orang Islam dari seantero bumi (Imad, 2013). Selain itu, kelompok radikal menolak sistem demokrasi yang menjadi sendi bagi negara bangsa, yang dianggap sebagai

pemisah antara agama dan negara (al-Qaraḍāwī, 2006). Penerapan syariat Islam (Thoyyib, 2018). Bagi kelompok radikal, sistem hukum yang dibuat dalam sidang parlemen adalah pengkhianatan atas konsep tauhid. Menurut kelompok radikal hanya Allah yang berhak membuat dan menetapkan hukum (*al-Musyarri'*) (Tibi, 2012). Aturan yang telah ditetapkan inilah yang diklaim oleh mereka sebagai syariat Islam. Kewajiban yang mendasar bagi umat Islam menerapkan syariat Islam (al-Qaraḍāwī, 2006).

Kegagalan produk hukum sistem demokrasi menurut kelompok radikal, terletak pada proses legislasi yang sarat kepentingan. Hukum yang benar dan selamat dari segala bentuk kepentingan dalam pandangan mereka, hanyalah hukum syariat yang berdasar pada al-Quran dan hadis. Jihad dan Kekerasan (Muzakki, 2014). Menurut Tibi, kelompok radikal berhasil membuat *framework* baru bagi jihad, yang telah keluar dari konteks historis dan substansinya sendiri (Tibi, 2012). Jihad menjadi perang dan aktivitas teror yang terjadi secara serampangan dan membabi buta serta objek yang tidak pandang bulu termasuk orang Islam sendiri (Khalil, 2017). Jihad berubah menjadi perang babi buta (*irregular warfare*) (Tibi, 2012).

Eksklusivisme Sosial (Tibi, 2012). Konstelasi sosial yang ingin dibangun oleh kelompok radikal adalah sebuah masyarakat tertutup dan eksklusif. Kelompok minoritas meskipun diakui namun hak sipil yang diberikan hanya hak minimal. Negara dalam pandangan mereka berhak menyentuh dan mengatur ruang privat. Sehingga sistem politik Islam yang ada dalam benak kelompok radikal tak lain sistem otoriter dan tirani. Kelompok radikal akan senantiasa melakukan propaganda anti-semit, baik untuk Yahudi dan Kristen. Kedua agama ini dianggap sebagai musuh dalam selimut, yang selalu menyerang Islam dari tempat yang gelap (al-Qaraḍāwī, 2006). Islam selalu diposisikan dan dinarasikan sebagai musuh bersama bagi agama dan peradaban yang ada diluar Islam.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian secara sistematis dan akurat (Anggito & Setiawan, 2018). Sumber data penelitian tentang pola dan strategi infiltrasi ideologi radikalisme di perguruan tinggi negeri Makassar, diperoleh dari penggunaan angket dan survei secara sistematis. Observasi yang digunakan proses

pengumpulan data ini adalah menggunakan teknik observasi partisipasi (Sugiyono, 2014) terhadap kegiatan-kegiatan yang dicurigai berkaitan dengan infiltrasi ideologi radikal. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dari dua teknik sebelumnya.

Jumlah responden penelitian sebanyak 350 mahasiswa aktif dan tercatat dalam *database* kemahasiswaan. Responden tersebar di seluruh fakultas dengan cara acak (*random sampling*). UIN Alauddin Makassar memiliki delapan fakultas yang terdiri dari (1) Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek); (2) Fakultas Syariah; (3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat; (4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI); (5) Fakultas Kesehatan; (6) Fakultas Dakwah dan Komunikasi; (7) Fakultas Adab dan Humaniora, dan (8) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Waktu penelitian berlangsung dari bulan Januari sampai bulan Mei 2019. Sehingga perlu dicatat bahwa Undang-undang pelarangan organisasi HTI di ruang publik belum ada.



### Kontestasi antara Negara Pancasila dan Negara Islam

Isu sentral dan paling strategis dalam proses infiltrasi ideologi radikalisme adalah narasi utopis tentang negara Islam. Kampanye tentang negara Islam dilakukan dengan menebarkan kegagalan sistem demokrasi melalui propaganda yang dibungkus dengan narasi kesalehan dan keagamaan. Terlebih lagi, wacana alternatif untuk kritik demokrasi, yaitu ideologi marxisme, anarkisme politik, teori kritis, dan postmodernisme, dianggap terlalu berat dan berlebihan. Berbeda dengan wacana negara Islam yang familiar dan bersentuhan langsung dengan afeksi keimanan. Sehingga manipulasi atas propaganda negara Islam merupakan lahan subur untuk melakukan diseminasi ajaran radikalisme.



Fenomena kontestasi dan pertarungan di UIN Alauddin Makassar terjadi dalam konteks wacana tentang negara ideal menurut responden. Sebagian besar responden, 50.57 %, menyatakan bahwa negara ideal adalah negara berkeadilan yang sesuai dengan tujuan hidup agama Islam. Sedangkan 39,14 % negara ideal menurut mereka adalah negara Islam berlandaskan al-Quran dan Hadis. Ketika kesesuaian Pancasila dengan ajaran Islam ditanyakan, 72 % menyatakan sudah sesuai dan 10.29 % menyatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Angka ini turun saat menempatkan posisi Pancasila dan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Dukungan untuk Pancasila sebagai ideologi negara berkurang ketika diperhadapkan dengan sistem syariat Islam. ketika responden dimintai tanggapannya tentang perubahan Indonesia menjadi negara Islam demi kepentingan syariah Islam; 32.57 % responden sangat bersedia, 29.14 bersedia, 28.86 % tidak bersedia, 9.43 % sangat tidak bersedia.

Mimpi untuk mengubah ideologi negara menjadi sistem negara Islam masih terpatri dan menjadi mimpi ideal di sebagian besar benak responden. Hal itu terlihat dengan dijadikannya agama sebagai salah satu kekuatan politik praktis dalam meraih kekuasaan. Ketika responden ditanya tentang calon pemimpin yang tidak beragama Islam maju dalam kontestasi politik, 50 % lebih tidak akan memilihnya, 48.29 % tidak memilihnya karena tidak beragama Islam. Secara lebih spesifik, 4.86 % tidak memilihnya karena keluarga mereka tidak memilihnya. Hanya 35.43 % yang akan memilih pemimpin tersebut yang berdasar atas integritas, kejujuran dan keadilan bukan atas dasar nama agama. Sama halnya pemimpin ideal menurut responden pertama-tama diukur oleh agamanya. Sekitar 47.14 % persen menganggap pemimpin ideal adalah pemimpin yang beragama Islam, sedangkan 34.29 % yang berpendapat pemimpin ideal adalah pemimpin yang adil meski tidak beragama Islam. Hal lebih memprihatinkan adalah 48 % responden akan mendukung jika ada tokoh Islam yang melakukan kampanye pembentukan negara Islam, sedangkan hanya 42.57 % dari responden yang memilih mempertahankan NKRI. Kontestasi ide dan gagasan tentang negara Islam terlihat jelas dari tanggapan responden terhadap ormas yang ingin mendirikan syariat Islam atau khilafah, 34.86 % setuju, 21.71 % tidak setuju, 33.14 % ragu dan 10.29 % tidak menjawab. Kontestasi dan pertarungan wacana di dunia kampus menjadi sangat aktif dan krusial bagi pengembangan ide-ide negara Islam.

### *Jihad dan Kekerasan Agama*

Terdapat pergeseran paradigma dalam penggunaan jihad dan pandangan tentang kekerasan beragama oleh responden ke arah yang lebih positif. Dalam hal ini harus diapresiasi, bahwa pemahaman tindak kekerasan atas nama agama bagi responden hanya merusak nama baik Islam. Kesadaran hukum juga terlihat cukup baik. Hal tersebut terlihat dari para tanggapan responden tentang orang-orang yang menghina Islam; 75 % lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan cara dialog dan menyerahkannya kepada aparat hukum. Demikian pula propaganda yang bersifat provokatif, telah terdapat kesadaran yang cukup signifikan bagi responden untuk melakukan verifikasi. Tanggapan para responden tentang tindak kekerasan baik itu bunuh diri, ataupun merusak fasilitas umum mengarah kepada respon positif. Mayoritas besar responden tidak setuju dengan seluruh aktifitas kekerasan, baik itu bom bunuh diri atau tindakan merusak kepentingan umum. Konsistensi tanggapan responden ini diuji dengan mengajukan pertanyaan berulang, dan hasilnya tetap baik tidak pernah mencapai angka di bawah 70 %.

Hal ini kembali menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak menjadikan agama terutama Islam sebagai alat kekerasan. Penyebaran agama yang dilakukan secara paksa, tindakan persekusi, bom bunuh diri, menyerang rumah ibadah agama lain, merupakan tindak kekerasan yang menodai dan merusak citra Islam secara damai. Respon tersebut berada pada jalur konsistensi yang positif. Meskipun harus diwaspadai ada beberapa responden yang bersedia melakukan bom bunuh diri, yang mencapai 8.05 %. Namun konsistensi jawaban ini diragukan sebab, ketika pertanyaan yang sama diajukan dalam redaksi berbeda, hasilnya, 2.87 % setuju dengan bom bunuh diri sebagai alat mencapai tujuan keagamaan.

### *Penerapan Syariat Islam*

Implementasi syariat dan perda keagamaan masih merupakan rangkaian dari sistem negara utopis khilafah. Kontestasi wacana tentang penerapan syariat masih terlihat jelas di kalangan responden. Sikap dilematis antara penerapan syariat dan sistem hukum positif terlihat jelas dalam pandangan para responden. Ketika responden ditanya tentang hukum potong tangan bagi pencuri; 38.86 % responden setuju, 29.14 % tidak setuju, 24.29 % ragu-ragu. Demikian pula ketika responden dimintai tanggapannya tentang perubahan Indonesia menjadi negara Islam demi kepentingan syariah Islam; 32.57 % responden sangat bersedia, 29.14 bersedia, 28.86 % tidak bersedia,

9.43 % sangat tidak bersedia. Sikap responden menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara gagasan faktual dengan visi ideal negara. Terdapat sisi retak yang memisahkan antara pandangan ideal (*das sollen*) dan persepsi faktual dan yang sebenarnya terjadi (*das sein*). Secara faktual responden menerima Pancasila sebagai gagasan bernegara serta sistem hukumnya, namun di sisi lain para responden belum mampu berdamai dengan gagasan ideal tentang negara Islam.

Penerimaan Pancasila menurun ketika responden ditanya apakah bersedia mengganti Pancasila dengan sistem syariah yang mencapai 58 %. Setengah dari responden bersedia mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan sistem syariat Islam. Padahal sebelumnya, 72 % responden menilai Pancasila telah sesuai dengan ajaran Islam. Dualitas dan keterbelahan tanggapan ini menunjukkan bahwa ekspektasi responden terhadap Pancasila tidak mampu memuaskan harapan ideal mereka tentang cita ideal sebuah negara. Kemungkinan besar penerimaan mereka terhadap Pancasila masih sebatas tekanan nasionalisme yang dipaksakan di tengah maraknya slogan patriotisme dan nasionalisme. Namun jika dikuak dan ditelusuri lebih dalam, nalar bawah sadar responden masih mengidolakan terbentuknya negara dengan dasar Islam, bahkan rela mengganti Pancasila sebagai ideologi negara yang ada. Ketidaksetujuan dengan Pancasila tersebut dapat diperparah ketika terdapat tokoh, gagasan yang mampu diterima secara publik membuktikan ketidakmampuan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada saat itu maka posisi Pancasila akan rentan.

### *Toleransi dan Lingkungan Inklusif*

Data survei menunjukkan bahwa interaksi mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan penganut agama lain relatif rendah. Interaksi yang paling akrab yang dimiliki mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan penganut agama lain adalah berasal dari pertemanan. Demikian pula sangat sedikit dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang memiliki tetangga non-muslim, terlebih tempat ibadah agama lain di tempat tinggal mereka. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar mayoritas hidup dalam lingkungan masyarakat Islam yang homogen, sehingga pergaulan dan interaksi mereka dengan individu yang berbeda masih sangat minim. Interaksi dan lingkungan mahasiswa UIN Alauddin Makassar terpola sebagai lingkungan eksklusif.

Dalam hal ini, diperlukan stimulus dalam membangun paradigma inklusif yang tidak mungkin diperoleh dari lingkungan tempat tinggal mereka. Institusi kampus harus hadir untuk menghadirkan iklim edukasi yang inklusif. Respon mahasiswa UIN Alauddin Makassar terhadap penyerangan rumah ibadah sangat baik dengan presentasi 84 persen, meskipun dalam tataran praktis masih perlu penegasan dan pembuktian. Hal tersebut terbukti dengan mahasiswa yang setuju untuk menghalangi pendirian rumah ibadah tersebut jika tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dengan persentase 45,71 persen. Masih terdapat gap yang cukup besar antara paradigma ideal dengan aplikasi ide, akibat lingkungan dan masyarakat yang homogen. Dengan demikian pihak kampus perlu memberikan iklim dan ekosistem pendidikan inklusif, yang mampu memberikan pengalaman interaktif dengan individu berbeda keyakinan, serta perjumpaan pergaulan yang mencerminkan kemajemukan dan heterogenitas yang dirasakan secara langsung.

#### *Diseminasi Wacana Radikalisme di UIN Alauddin Makassar*

Hasil wawancara mendalam dari beberapa responden yang bersedia serta dari hasil observasi peneliti tentang proses diseminasi ide radikalisme di kampus menunjukkan bahwa wacana tentang negara Islam tersirkulasi dan tersebar melalui mimbar non formal dengan menjadikan masjid sebagai pusat kajian. Peran dan sikap masjid Kampus yang terbuka dimanfaatkan gerakan pro-khilafah seperti “Gema Pembebasan”, sayap Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai lahan diseminasi wacana. Kegiatan pengajian dan diskusi secara rutin digelar dengan membentangkan bendera yang bertuliskan kalimat tauhid di dinding masjid. Kajian dilakukan kadang di pelataran masjid, dan jika memungkinkan dilaksanakan di dalam masjid dengan menggunakan fasilitas masjid.

Kajian dilaksanakan setelah shalat ashar, ketika suasana kampus telah lengang, dan aktivitas perkuliahan telah selesai. Peserta kajian kebanyakan berasal dari mahasiswi yang bermukim di asrama, dan sebagian kecil dari kelompok pria. Para pembicara tidak ada dari kalangan dosen melainkan pemateri dari luar yang tidak sempat dibebankan identitas mereka. Peserta hanya mengenal pemateri melalui moderator yang memperkenalkan pemateri. Pemateri berasal dari luar UIN Alauddin Makassar terutama dari institusi lain dengan pekerjaan sebagai aktivis atau dosen di kampus lain. Tema kajian tidak langsung berbicara tentang khilafah tetapi dibungkus dengan tema aktual terutama kritik terhadap kebijakan publik pemerintah, masalah hutang negara,

sistem politik uang dalam pemilu, dan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah politik. Tema tersebut terbungkus rapi dan disampaikan dengan retorika yang menggugah. Diakhir atau di sela-sela kajian tersebut terselip gagasan anti demokrasi, kekurangan ideologi Pancasila, kegagalan umat Islam dalam mengelola negara, pentingnya menerapkan syariat Islam dan tema radikalisme lainnya. Para peserta kajian juga cukup banyak dan sesak, terutama karena kajian dengan duduk bersila membentuk setengah lingkaran, yang dilaksanakan di pelataran Masjid Kampus. Ramainya peserta kajian bisa jadi karena para peserta tetap kajian berasal dari beberapa kampus lain di Makassar di tambah dengan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden ditemukan bahwa hal yang menarik dari kajian yang dilakukan oleh kelompok “Gema Pembebasan” adalah tema kajian yang aktual, serta mengajarkan ajaran Islam yang murni yang sesuai dengan al-Quran dan Hadis. Afeksi dan perasaan ketertinggalan Islam, menjadi korban dari peradaban Barat, serta adanya konspirasi dunia untuk melawan Islam diartikulasikan secara retorik untuk menggugah simpati religiusitas dari para peserta. Posisi umat Islam diposisikan sedilematis mungkin yang telah kehilangan semangat keagamaan akibat kelalaian dalam mengemban amanah politik yang ada dalam Islam. Kegagalan dan dekadensi moral yang terjadi, terutama seks bebas diakibatkan oleh tidak diterapkannya syariah secara utuh. Narasi yang dibangun bahwa umat Islam belum memeluk Islam secara utuh. Ajakan untuk memeluk Islam secara utuh (*kaffah*) diartikulasi secara total untuk membuktikan realitas krisis yang dialami umat Islam karena memeluk Islam tanpa totalitas dan hanya setengah-setengah. Totalitas memeluk Islam hanya dapat tercapai ketika umat Islam mampu menerapkan seluruh ajaran Islam dalam tiap sendi kehidupannya. Kesempurnaan iman dan Islam seorang muslim hanya dapat tercapai ketika seorang mampu menjalankan ajaran Islam secara total dan penuh dalam dimensi sosial, politik dan ekonomi.

Gagasan dari kajian ini ketika dielaborasi dengan kemampuan retorika yang handal akan menimbulkan afeksi dan simpati yang dalam bagi para peserta. Narasi kesalehan agama dimanipulasi untuk memuluskan jalan dalam melakukan proses indoktrinasi ideologi kepada para peserta. Secara pelan namun pasti, kajian mereka mampu meraih simpati terutama dari mahasiswa yang berasal dari jurusan eksak dan ilmu murni yang tidak mendapatkan pengajaran dan bimbingan agama secara serius di fakultas atau jurusan mereka. Hal yang disayangkan adalah bahwa gerakan mereka sulit

mendapatkan tandingan serius dari organisasi mahasiswa yang moderat dan beraliran nasionalis. Wacana tandingan dan publikasi gerakan moderat dan nasionalis kalah populer dari gerakan kajian yang diorganisasi oleh Gema Pembebasan. Selain itu tampilan kreatif dari kajian Gema Pembebasan menarik dan dipublikasi secara terstruktur pada tiap fakultas. Pergerakan organisasi mereka berjalan melalui koordinasi dengan komando yang rapi dan sistematis. Organisasi kemahasiswaan yang beraliran nasionalis seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah dilarang untuk beraktivitas secara resmi di dalam kampus. Akibatnya organisasi moderat dan nasionalis ini tidak mampu membendung wacana yang dikelola secara sistematis dari kelompok Gema Pembebasan. Padahal, Gema Pembebasan adalah organisasi otonom yang berinduk pada Hizbut Tahrir Indonesia yang tidak tercatat pada organisasi kampus. Hanya saja, karena kader dan simpatisan Gema Pembebasan memiliki posisi strategis di kampus, yang menjadi pintu masuk untuk menggunakan fasilitas dan sarana Kampus.

Terdapat faktor utama yang membuat gerakan dan organisasi yang moderat dan nasionalis gagal menghalau terlebih memproduksi wacana tandingan untuk gerakan radikal. Para kader-kader organisasi moderat telah terstigma liberal dan jarang aktif dalam ritual keagamaan. Para kader PMII, HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) jarang menampilkan kesalehan publik yang mampu meraih simpati dari para mahasiswa dari jurusan lain. Demikian pula proses kaderisasi dari organisasi moderat tersebut belum mampu secara masif masuk ke kantong-kantong strategis yang berada pada fakultas eksak.

Proses kaderisasi mereka hanya kuat pada fakultas yang tradisi diskusi dan sirkulasi ide keislaman yang telah kuat dan mapan, seperti Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Adapun kaderisasi di fakultas eksak seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan masih sangat minim dan bahkan tidak ada. Belum lagi konflik antara organisasi moderat keagamaan yang cukup serius sehingga musuh ideologis mereka mampu memanfaatkan peluang secara strategis dalam meraih simpatisan dan kader yang ditinggal akibat konflik yang berkepanjangan antar organisasi tersebut. Faktor inilah yang membuat gerakan organisasi radikal semakin mampu mendapatkan ruang dalam wacana keislaman yang ada di kampus.

### *Kontestasi Wacana Radikalisme di UIN Alauddin Makassar*

Berdasar pada pemaparan dan data sebelumnya terdapat beberapa temuan penelitian yang perlu mendapatkan perhatian: *Pertama*, responden tidak lagi menjadikan tindak kekerasan fisik yang mengatasnamakan agama sebagai bentuk perjuangan agama. Tren positif ini perlu diapresiasi dan harus terus mendapatkan pengawalan dari pihak kampus dan pengembalian kebijakan. *Kedua*, benih dan persebaran ide radikalisme sebenarnya mengambil bentuk baru, yaitu pola kerja Islamisme institusional. Sebagaimana yang telah disinggung pada kerangka teoritis sebelumnya, pola kerja Islamisme adalah mengganti sistem yang ada dengan menggunakan prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berpendapat di ruang publik. Dalam kasus dunia kampus, pola kerja Islamisme institusional adalah melakukan propaganda kelemahan Pancasila, dan bahkan memperhadapkan Pancasila dengan sistem negara Islam. Hal itu terbukti dari penerimaan Pancasila sebagai dasar negara yang belum mengakar kuat dalam ruang wacana dan diskursus mahasiswa.

Pancasila secara khusus dan bentuk negara demokrasi secara umum belum diterima sebagai ideologi ideal di lingkungan kampus. Inkonsistensi jawaban dari para responden, ketika diuji lebih dalam dengan membandingkan antara Pancasila dengan ideologi keislaman terlihat sangat jelas. Gagasan Islamisme masih menjadi mimpi utopis bagi responden dalam sistem pengelolaan negara. Presentasi mahasiswa yang memimpikan negara Islam bukan sebuah jumlah minoritas di UIN Alauddin, melainkan jumlah yang berimbang dengan presentasi mahasiswa yang menerima Pancasila sebagai sistem negara ideal bagi Indonesia. Penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi ajang kontestasi di kalangan mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Wacana kesesuaian Pancasila dengan sistem Islam belum menjadi wacana dan paradigma politik yang dominan bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa dunia kampus menjadi ajang pertarungan wacana sengit dalam persebaran ideologi radikal.

*Ketiga*, literasi radikalisme dan tokoh-tokohnya masih sangat minim di kalangan mahasiswa. Hal tersebut terlihat dari wawasan responden tentang organisasi keagamaan yang kerap mengajarkan kekerasan serta para tokohnya masih sangat minim. Para responden tidak memiliki wawasan memadai tentang tokoh dan organisasi kekerasan. Demikian pula sebaliknya, wawasan responden tentang organisasi yang mengkampanyekan gerakan damai dan toleransi juga cukup minim. Ketika responden diminta untuk mengidentifikasi

organisasi dan tokoh kekerasan, sangat sedikit yang mampu memberikan jawaban yang memadai. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya dan kebijakan strategis untuk memperkuat pengetahuan mahasiswa dalam bidang kekerasan agama. *Keempat*, sistem negara berdasar syariat Islam masih menjadi utopia politik di kalangan responden. Terjadi bias dalam nalar politik responden. Terjadi pertarungan dalam alam bawah sadar para responden untuk menerima secara utuh Pancasila. Data tersebut menunjukkan bahwa konsep negara ideal bagi para responden masih menjadikan negara Islam sebagai cita dan visi politik. Namun sikap penolakan itu tidak ditampakkan secara terang-terangan, melainkan terjadi polemik yang dilematis antara sikap patriotisme kebangsaan dan spirit religiusitas. Penolakan akan terjadi jika dipantik oleh stimulus yang mampu meyakinkan untuk mengganti Pancasila. Terlebih jika diskursus akademik dan media-media yang mampu memberikan alasan rasional serta argumen logis mendorong keberanian menolak Pancasila. Pertarungan dan kontestasi wacana inilah yang akan digunakan oleh kelompok radikal untuk propaganda anti Pancasila. *Kelima*, diperlukan stimulus yang aplikatif dalam aktualisasi nilai moderasi keagamaan. Hal itu diperlukan karena mayoritas responden hidup di lingkungan homogen. Sehingga interaksi mereka dengan penganut agama dan keyakinan berbeda masih sangat minim.

## Simpulan

Penerimaan ide dan wacana radikal di kampus UIN Alauddin Makassar tidak terlepas dari minimnya literasi wacana ide radikal yang mampu bersembunyi di balik semangat keislaman. Islam berhasil ditempatkan sebagai kapital dan instrumen politik untuk melegitimasi penafsiran radikal atas isu politik, agama dan kekuasaan. Akibatnya, bagi mahasiswa yang minim literasi tentang ide dan gagasan progresif Islam, akan mudah terpengaruh oleh propaganda dari ajaran radikal. Selain itu, penerimaan ide radikal tak terlepas dari kemampuan retorik para kader, dalam memposisikan umat Islam sebagai korban sistem demokrasi kapitalis. Manipulasi afektif ini berhasil meraih simpati dari mahasiswa yang belum memiliki wawasan keislaman yang matang.

Gagasan dan ide radikal yang berhasil lolos dari sensor dunia akademik, disebabkan oleh kesalehan individual yang ditunjukkan oleh kader Gema Pembebasan. Mereka berhasil menguasai fasilitas ibadah publik dan menjadi pengurus di sana. Dengan usaha itu, mereka mampu memberikan pengajaran dan diseminasi wacana radikalisme di UIN Alauddin Makassar. Hal lain yang



perlu menjadi perhatian serius adalah ajaran radikalisme berhasil dibungkus secara mudah, menarik, dan mampu memanipulasi sentimen dan afeksi keagamaan. Ide radikalisme tidak secara banal dan vulgar disampaikan, melainkan terjadi proses indoktrinasi yang sistematis dan terukur. Proses indoktrinasi yang terselubung inilah yang perlu diwaspadai dan dipertimbangkan. Berdasar dari hal ini, maka narasi kontra radikalisme memerlukan sebuah kurikulum yang lebih elegan, menarik dan mampu resisten atas ide radikalisme.

Secara umum, kampus UIN Alauddin Makassar sebenarnya memiliki tren anti radikalisme yang cukup positif, bahkan sebelum rektor mengeluarkan pelarangan kegiatan aktivitas HTI di mimbar-mimbar kampus. Komitmen terhadap sikap anti kekerasan dalam isu-isu keislaman mengarah kepada hasil yang baik. Wawasan toleransi keagamaan juga berada jalur yang baik, meskipun hal tersebut belum diuji dalam dunia real. Sebab interaksi dan pengalaman responden atas praktik pluralisme masih sangat minim. Hal yang perlu diberikan catatan adalah kontestasi Pancasila dengan sistem *khilafah*, penerapan syariat Islam dan isu politik Islamisme lainnya, masih begitu rentan. Terjadi kontestasi ide yang tidak dimenangkan oleh kelompok manapun. Sehingga pertarungan dan perebutan wacana tentang negara Pancasila dan negara Islam masih terus berdinamika di tataran akar rumput mahasiswa.

## Referensi

- al-Qaraḍāwī, Y. (2006). *al-Hulūl al-Mustauradah wa Kaifa Janat ‘alā Ummatinā* (1st ed.). Maktabah Wahbah.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV Jejak.
- Cesary, J. (2018). *What Is Political Islam?* (1st ed.). Lynne Rienner Publisher.  
<https://lccn.loc.gov/2017035339>
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)* (4th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Fautanu, I. (2022). Radicalism Among Students: A Study of Perception of Radicalism of Indonesian and Malaysian Students. *Khazanah Sosial*, 4(1), 131–144.  
<https://doi.org/10.15575/ks.v4i1.17297>
- Fealy, G. (2004). Islamic Radicalisme in Indonesia: The Faltering Revival? Source: *Southeast Asian Affairs*, *Utheast Asian Affairs*, 104–121. <http://www.jstor.org>
- Goerzig, C., & Al-Hashimi, K. (2014). *Radicalization in Western Europe*. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781315817118>
- ‘Imād, ‘Abd al-Ganī. (2013). *al-Islamiyyun bain al-Saurah wa al-Daulah; Isykalīyyāh Intāj al-Namūzaj wa Bināa al-Khiṭāb* (1st ed.). Markaḥ Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabiyyah.
- Khalil, M. H. (2017). *Jihad, Radicalism, and the New Atheism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108377263>
- Mandaville, P., Noor, F. A., Horstmann, A., Reetz, D., Riaz, A., Roul, A., Hasan, N., Fauzi, A., Hamid, A., Banlaoi, R. C., & Liow, J. C. (2009). *Transnational Islam in South and Southeast Asia Movements, Networks, and Conflict Dynamics*. <http://www.nbr.org>
- McLaughlin, P. (2012). *Radicalism*. Palgrave Macmillan UK.  
<https://doi.org/10.1057/9781137034823>
- Miftahudin, Saepudin, Hidayat, A., Hanafi, & Fauzi, A. (2021). Empowering Students’ Religiosity to Fight Radicalism and Anarchism after Covid-19 and The Act of Omnibus Law at Higher Education. *Al-Ulum*, 21(2).  
<https://doi.org/10.30603/au.v21i2.2329>
- Munabari, F., Larasati, N. U., Ihsan, R., & Nurhadiyanto, L. (2020). Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State. *Jurnal Politik*, 5(2), 281. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.263>
- Muzakki, A. (2014). The roots, strategies, and popular perception of islamic radicalism in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 8(1), 1–22.  
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2014.8.1.1-22>
- Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia* (J Hasse, Ed.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Rahmatiah, R., Suhendra Arbani, T., Rais Asmar, A., Umar, K., Chaerul Risal, M., & Fajri, M. (2022). *The Significance and Integration of Religious Moderation in*

- Student Organizations on Religious Campuses. *KnE Social Sciences*, 549–559. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10773>
- Steiner, K., & Önnersfors, A. (2018). Expressions of Radicalization: Global Politics, Processes and Practices. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-65566-6>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (4th ed.). Alfabeta.
- Thoyyib, M. (2018). Radikalisme Islam Indonesia. In *Jurnal Studi Pendidikan Islam* (Vol. 1, Issue 1).
- Tibi, B. (2012). *Islam and Islamism* (1st ed.). Yale University Press.
- Tibi, B. (2014). *Political Islam, World Politics and Europe; From Jihadist to Institutional Islamism* (1st ed.). Routledge .
- Wicaksana, S. U., Arifin, S., Hariri, A., Efendi, A. B., & Harris, N. R. (2021). Patterns of Spreading Radicalism in Muhammadiyah Islamic Boarding Schools in East Java. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 6(2), 174–185. <https://doi.org/10.22373/petita.v6i2.120>
- Wiji, B., Sadarusalam, A., & Hasan, K. (2019). The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP) Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Di Indonesia. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/index>
- Williams, A. (2020). *Political Hegemony and Social Complexity*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-19795-7>
- Žižek, Slavoj. (1994). *Mapping ideology*. Verso.

**This page intentionally left blank**